



BUPATI BLORA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA
NOMOR 24 TAHUN 2018

TENTANG

PENYELENGGARAAN DAN RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BLORA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melindungi kepentingan umum, menjamin kebenaran dalam pengukuran serta menciptakan ketertiban dan kepastian hukum, perlu dilakukan tera dan tera ulang alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya;
 - b. bahwa sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka pelaksanaan metrologi legal berupa tera, tera ulang dan pengawasan merupakan kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 110 ayat (1) huruf 1 dan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah maka Pemerintah Daerah dapat memungut retribusi atas pelayanan tera/tera ulang yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
 3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3193);
 4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3281);
 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985 tentang Wajib dan Pembebasan Untuk Ditera dan/atau Ditera Ulang Serta Syarat-Syarat Ukuran, 'Timbangan, Takaran dan Perlengkapannya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3388);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1989 tentang Standar Nasional untuk Satuan Ukuran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3388);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BLORA

dan

BUPATI BLORA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
DAN RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Blora.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Blora.
4. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
5. Tempat Usaha adalah tempat yang digunakan untuk kegiatan-kegiatan perdagangan, industri, produksi, usaha jasa, penyimpanan-penyimpanan dokumen yang berkenaan dengan perusahaan juga kegiatan-kegiatan penyimpanan atau pameran barang-barang termasuk rumah tempat tinggal yang sebagian dipergunakan untuk kegiatan-kegiatan tersebut.
6. Alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya yang selanjutnya disingkat UTTP adalah alat-alat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal.
7. Tera adalah suatu kegiatan menandai dengan tanda Tera sah atau Tera Batal yang berlaku atau memberikan keterangan tertulis yang bertanda Tera sah atau tanda Tera batal yang berlaku, dilakukan oleh Penera berdasarkan hasil pengujian yang dijalankan atas Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya yang belum dipakai, sesuai persyaratan dan/atau ketentuan yang berlaku.

8. Tera Ulang adalah suatu kegiatan menandai secara berkala dengan tanda Tera Sah atau tanda Tera batal yang berlaku, atau memberikan keterangan tertulis yang bertanda Tera Sah atau tanda Tera Batal yang berlaku, dilakukan oleh Pegawai yang berhak/Penera berdasarkan hasil pengujian yang dijalankan atas Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya yang telah di Tera.
9. Wajib Tera/Tera Ulang adalah suatu keharusan bagi alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya untuk ditera/tera ulang.
10. Tanda Tera adalah tanda yang dibubuhkan atau dipasang pada UTTP atau surat keterangan tertulis yang menyatakan sah atau tidaknya UTTP digunakan setelah dilakukan pemeriksaan.
11. Tanda Sah adalah tanda yang dibubuhkan dan/atau dipasang pada UTTP atau pada surat keterangan tertulis terhadap UTTP yang memenuhi syarat teknis pada saat ditera atau tera ulang.
12. Tanda Batal adalah tanda yang dibubuhkan UTTP atau pada surat keterangan tertulis terhadap UTTP yang tidak memenuhi syarat teknis pada saat ditera atau tera ulang.
13. Tanda Jaminan adalah tanda yang dibubuhkan atau dipasang pada bagian - bagian tertentu dari UTTP yang sudah disahkan pada waktu ditera/tera ulang, untuk mencegah penukaran atau perubahan.
14. Tanda Daerah adalah tanda yang dibubuhkan atau dipasang pada UTTP yang disahkan pada waktu ditera untuk mengetahui tempat dimana tera dilakukan.
15. Barang Dalam Keadaan Terbungkus adalah barang atau komoditas tertentu yang dimasukkan dalam kemasan tertutup, dan untuk dapat mempergunakannya harus merusak kemasan atau segel kemasan yang kuantitasnya telah ditentukan dan dinyatakan dalam label sebelum diedarkan, dijual, ditawarkan atau dipamerkan
16. Tanda Pegawai Yang Berhak yang selanjutnya disebut Tanda Pegawai Berhak adalah tanda yang dibubuhkan atau dipasang pada UTTP yang disahkan pada waktu ditera/tera ulang untuk mengetahui pegawai berhak yang melakukan tera/tera ulang.
17. Penguji adalah pegawai yang berhak melakukan pengujian pada Balai Pengelolaan Laboratorium Kemetrolgian yang ditunjuk/ditugaskan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

18. Penera adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Dinas teknis yang membidangi kemetrolagian yang mempunyai keahlian khusus dan diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh Pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pelayanan penyelenggaraan Tera, Tera Ulang Alat-alat, Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya, Kalibrasi Alat Ukur Serta Pengujian Barang Dalam Keadaan Terbungkus.
19. Alat ukur Metrologi Teknis adalah selain Alat Ukur Metrologi Legal.
20. Menjustir adalah mencocokkan atau melakukan perbaikan ringan dengan tujuan agar alat-alat yang dicocokkan atau diperbaiki itu memenuhi persyaratan Tera atau Tera Ulang.
21. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu
22. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
23. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data obyek dan subyek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
24. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
25. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
26. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi terutang atau seharusnya tidak terutang.
27. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi atau Sanksi Administratif berupa bunga dan/atau denda.
28. Kedaluwarsa adalah gugur karena lewat waktu.

29. Kas Daerah adalah kas daerah Kabupaten Blora.
30. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.
31. Pejabat Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.
32. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara obyektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
33. Penyidikan Tindak Pidana Di Bidang Retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

TUJUAN, RUANG LINGKUP, DAN ASAS

Pasal 2

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

- a. meningkatkan pelayanan dalam kegiatan niaga dan jasa;
- b. terwujudnya tertib ukur alat UTP yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen;
- c. terwujudnya pelaku usaha yang lebih profesional dan terpercaya;
- d. terwujudnya pasar tradisional dan tempat perbelanjaan yang tertib ukur;
- e. meningkatkan potensi pendapatan daerah dari retribusi Tera/Tera Ulang secara mandiri.

Pasal 3

Ruang Lingkup dari Peraturan Daerah ini adalah pengaturan terhadap:

- a. penyelenggaraan Tera/Tera Ulang UTP, terdiri dari:
 1. Jenis UTP;
 2. Jenis Tanda Tera;

3. Tempat Penyelenggaraan Tera/Tera Ulang;
 4. Masa Berlaku Tera/Tera Ulang;
 5. Pelaksana Tera/Tera Ulang; dan
 6. Kerjasama Penyelenggaraan.
- b. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang alat UTTP, terdiri dari:
1. nama, obyek dan subyek retribusi;
 2. golongan retribusi;
 3. struktur dan besarnya tarif retribusi;
 4. pemungutan retribusi;
 5. tata cara pemungutan;
 6. penentuan pembayaran, tempat pembayaran, angsuran dan penundaan pembayaran;
 7. penagihan retribusi;
 8. penghapusan piutang retribusi yang kadaluarsa;
 9. kadaluarsa penagihan;
 10. keberatan Wajib Retribusi;
 11. pengembalian kelebihan pembayaran;
 12. pemberian keringanan, pembebasan retribusi;
 13. pemeriksaan retribusi;
 14. insentif pemungutan.
- c. sanksi administratif;
- d. ketentuan penyidikan; dan
- e. ketentuan pidana.

Pasal 4

Penyelenggaraan Tera dan/atau Tera Ulang alat-alat UTTP berdasarkan asas :

- a. kepastian hukum;
- b. perlindungan hukum; dan
- c. berkelanjutan.

BAB III

PENYELENGGARAAN TERA/TERA ULANG UTTP

Bagian Kesatu

Jenis UTTP

Pasal 5

Jenis UTTP terdiri dari :

- a. alat ukur panjang;
- b. alat ukur permukaan cairan (*level gauge*);
- c. takaran, meliputi: takaran kering dan takaran basah;

- d. tangki ukur;
- e. tangki ukur gerak;
- f. alat ukur dari gelas;
- g. bejana ukur;
- h. meter taksi;
- i. alat ukur cairan minyak;
- j. alat ukur gas;
- k. meter air;
- l. meter cairan minum selain air;
- m. alat kompensasi suhu/tekanan/kompensasi lainnya;
- n. *meter prover*;
- o. meter arus massa;
- p. alat ukur pengisi (*filling machine*);
- q. meter listrik/meter kWh;
- r. pembatas arus listrik;
- s. anak timbangan;
- t. timbangan;
- u. meter energi listrik lainnya;
- v. alat ukur tekanan; dan
- w. meter kadar air.

Pasal 6

- (1) UTTP yang secara langsung maupun tidak langsung digunakan atau disimpan dalam keadaan siap pakai untuk keperluan menentukan hasil pengukuran, penakaran atau penimbangan dengan jenis UTTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 untuk:
 - a. kepentingan umum;
 - b. usaha;
 - c. menyerahkan atau menerima barang;
 - d. menentukan upah atau pungutan;
 - e. menentukan produk akhir dari perusahaan; atau
 - f. melaksanakan peraturan perundang-undangan;
 wajib ditera/ditera ulang.
- (2) UTTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. menggunakan satuan Sistem Internasional (SI) dan berdasarkan desimal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. dibuat dari bahan yang tahan aus, tahan perubahan bentuk, tahan pengaruh cuaca, dan konstruksinya sesuai dengan penggunaan yang wajar, serta menjamin ketahanan sifat ukurnya dan tidak mudah memberikan kesempatan untuk dilakukannya perubahan curang; dan/atau

- c. persyaratan lain yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan UTTP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) UTTP yang khusus diperuntukan atau dipakai untuk keperluan rumah tangga dibebaskan dari kewajiban Tera/Tera Ulang.
- (2) UTTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pertama kalinya wajib diuji oleh Perangkat Daerah yang mengelola kemetrolagian.
- (3) UTTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
- a. menggunakan satuan Sistem Internasional (SI) dan berdasarkan desimal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. dibuat dan konstruksinya berbeda dari UTTP yang wajib ditera;
 - c. dibubuhi tulisan yang cukup jelas sesuai tujuan penggunaannya;
 - d. persyaratan lain yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan UTTP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) UTTP yang digunakan untuk pengawasan atau kontrol di dalam perusahaan atau di tempat lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dapat dibebaskan dari kewajiban Tera Ulang.
- (2) UTTP yang dibebaskan dari kewajiban Tera Ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.
- (3) UTTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. menggunakan satuan Sistem Nasional (SN) dan berdasarkan desimal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. dibuat dari bahan yang tahan aus, tahan perubahan bentuk, tahan pengaruh cuaca, dan konstruksinya sesuai dengan tujuan penggunaannya, serta menjamin ketahanan sifat ukurnya; dan/atau

- c. persyaratan lain yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (4) UTTP yang dibebaskan dari Tera Ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibubuhi tulisan "HANYA UNTUK KONTROL PERUSAHAAN" oleh Perangkat Daerah yang mengelola kemetrolgian.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan UTTP dan tata cara pengajuan pembebasan Tera Ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Jenis Tanda Tera

Pasal 9

- (1) Jenis Tanda Tera terdiri dari:
- tanda sah;
 - tanda batal;
 - tanda jaminan;
 - tanda daerah;
 - tanda pegawai yang berhak.
- (2) Tanda sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibubuhkan dan/atau dipasang pada UTTP yang disahkan pada waktu ditera atau ditera ulang.
- (3) Tanda batal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibubuhkan pada UTTP yang dibatalkan pada waktu ditera atau ditera ulang.
- (4) Tanda jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dibubuhkan dan/atau dipasang pada bagian UTTP yang disahkan untuk mencegah penukaran dan/atau perubahan.
- (5) Tanda daerah dan tanda pegawai yang berhak dibubuhkan pada UTTP agar diketahui dimana dan oleh siapa peneraan dilakukan.
- (6) Tanda sah dan tanda batal yang tidak mungkin dibubuhkan pada UTTP diberikan surat keterangan tertulis sebagai penggantinya.
- (7) Ketentuan mengenai ukuran, bentuk, jangka waktu berlakunya, tempat pembubuhan dan cara membubuhkan tanda Tera diatur dengan dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Tempat Penyelenggaraan Tera/Tera Ulang

Pasal 10

Tempat penyelenggaraan Tera/Tera Ulang dapat dilakukan pada:

- a. kantor Perangkat Daerah yang membidang kemetrologian;
- b. luar kantor Perangkat Daerah yang membidang kemetrologian yang bersifat pelayanan keliling;
- c. tempat UTTP berada dan/atau tidak dapat dipindahkan.

Bagian Keempat
Masa Berlaku Tera/Tera Ulang

Pasal 11

Masa berlaku pelayanan Tera dan/atau Tera Ulang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Pelaksana Tera/Tera Ulang

Pasal 12

- (1) Tera/Tera Ulang UTTP dilakukan oleh Pegawai yang berhak menera dan menera ulang.
- (2) Pegawai yang berhak menera dan menera ulang mempunyai wewenang sebagai berikut:
 - a. mengesahkan, menjustir, atau membatalkan UTTP yang diperiksa dan diuji;
 - b. menolak untuk memberi tanda sah terhadap UTTP batal atau tidak memenuhi persyaratan;
 - c. menolak untuk melakukan kegiatan tera atau tera ulang UTTP, apabila tidak memenuhi persyaratan administrasi dan syarat teknis;
 - d. merusak UTTP yang telah diuji pada saat kegiatan tera atau tera ulang berdasarkan hasil pengujian yang menyatakan UTTP tidak memenuhi syarat teknis serta tidak dapat diperbaiki lagi; dan
 - e. menggunakan tanda Pegawai yang berhak menera dan menera ulang yang telah ditetapkan.
- (3) Pegawai yang berhak menera dan menera ulang mempunyai kewajiban sebagai berikut:

- a. memberi penjelasan, informasi, atau keterangan kegiatan tera atau pelayanan tera ulang UTTP kepada wajib tera atau wajib tera ulang;
- b. menolak UTTP yang tidak dapat dilayani untuk dilakukan kegiatan tera atau pelayanan tera ulang;
- c. menera atau menera ulang setiap UTTP yang diajukan oleh wajib tera atau wajib tera ulang;
- d. menjelaskan kepada wajib tera atau wajib tera ulang tentang pembatalan atau perusakan UTTP yang tidak memenuhi syarat teknis;
- e. melaksanakan kegiatan teknis pemeriksaan dan pengujian UTTP berdasarkan syarat teknis;
- f. menggunakan formulir cerapan sesuai peruntukannya atau catatan teknis pada setiap kegiatan pengujian UTTP yang ditera atau ditera ulang dan menyampaikan pada pimpinan sidang, regu, atau unit setempat; dan
- g. membuat berita acara hasil pemeriksaan dan pengujian UTTP yang ditera atau ditera ulang.

Bagian Keenam

Kerjasama Penyelenggaraan

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah dapat melaksanakan kerja sama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota lain dalam rangka penyelenggaraan pelayanan Tera/Tera Ulang di wilayah Daerah.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan efisiensi dan efektivitas.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam nota kesepahaman yang memuat paling sedikit:
 - a. pembiayaan pelaksanaan kegiatan pelayanan Tera/Tera Ulang;
 - b. penggunaan peralatan standar;
 - c. sumber daya manusia kemetrolagian; dan
 - d. jangka waktu pelaksanaan.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan kerjasama berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG

Bagian Kesatu

Nama, Objek, Dan Subjek Retribusi

Pasal 14

Dengan nama Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang, dipungut retribusi atas pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya, dan pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

Objek Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 terdiri dari:

- a. pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya; dan
- b. pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Subjek Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 meliputi orang pribadi atau Badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan Tera/Tera Ulang dari Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi, diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang.

Pasal 17

Retribusi Tera/Tera Ulang digolongkan sebagai retribusi jasa umum.

Bagian Kedua
Perhitungan Dan Tarif Retribusi

Paragraf 1
Pengukuran Tingkat Retribusi

Pasal 18

Tingkat penggunaan jasa Tera, Tera Ulang UTTP diukur berdasarkan tingkat kesulitan, karakteristik, jenis, kapasitas serta peralatan pengujian yang digunakan.

Paragraf 2
Prinsip dan Sasaran Penetapan Retribusi

Pasal 19

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasional dan pemeliharaan, biaya bunga dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, menetapkan tarif kerja untuk menutup sebagian biaya.

Paragraf 3
Penetapan Struktur dan Tarif Retribusi

Pasal 20

Struktur dan besaran tarif Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang ditetapkan berdasarkan pelayanan Tera/Tera Ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.

Pasal 21

- (1) Besaran tarif Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

- (2) Besaran tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (3) Peninjauan kembali tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian daerah.
- (4) Besaran tarif retribusi hasil peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (5) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku sampai dengan ditetapkannya Peraturan Bupati tentang besaran tarif retribusi hasil peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Bagian Ketiga

Masa Retribusi

Pasal 22

Masa retribusi ditetapkan berdasarkan masa berlaku tanda tera sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

Masa retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, tidak berlaku apabila UTTP mengalami perubahan fisik dan non fisik sehingga mengalami perubahan sifat ukurnya.

Bagian Keempat

Wilayah Dan Tata Cara Pemungutan

Pasal 24

Wilayah pemungutan retribusi dipungut pada tempat pelayanan Tera/Tera Ulang diberikan.

Pasal 25

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.

- (3) Pembayaran retribusi oleh Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tunai/lunas, dengan menggunakan SSRD.
- (4) Ketentuan lebih lanjut tata cara pemungutan diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima

Tata Cara Pembayaran, Penyetoran, Tempat Pembayaran, Angsuran, Penundaan Pembayaran Dan Penagihan Retribusi

Pasal 26

- (1) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran, angsuran, dan penundaan pembayaran retribusi diatur dalam Peraturan Bupati.
- (2) Semua penerimaan retribusi disetor ke Kas Daerah.

Bagian Keenam

Pemanfaatan

Pasal 27

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan Tera/Tera Ulang.
- (2) Ketentuan mengenai alokasi pemanfaatan penerimaan Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan untuk:
 - a. penggantian biaya jasa atas pelayanan Tera/Tera Ulang;
 - b. penerbitan dokumen retribusi;
 - c. pengawasan di lapangan;
 - d. penegakan hukum; dan
 - e. penatausahaan.

Bagian Ketujuh

Keberatan

Pasal 28

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan kepada Bupati melalui pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 29

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima, harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Bupati.
- (3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (4) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terlewati dan Bupati tidak memberi keputusan, maka keberatan yang diajukan dianggap dikabulkan.

Pasal 30

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) perbulan, paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

Bagian Kedelapan
Pengembalian Kelebihan Pembayaran

Pasal 31

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, maka permohonan pengembalian pembayaran retribusi dianggap dikabulkan.
- (4) SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (5) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (6) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (7) Jika pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) perbulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran retribusi.
- (8) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kesembilan
Kedaluwarsa

Pasal 32

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi Kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.

- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung jika:
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, Kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 33

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah Kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah Kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah Kedaluwarsa diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kesepuluh

Pembukuan Dan Pemeriksaan

Pasal 34

- (1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan di bidang retribusi daerah.
- (2) Wajib Retribusi yang diperiksa berkewajiban:
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek retribusi yang terutang;

- b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan retribusi diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kesebelas
Insentif Pemungutan Retribusi

Pasal 35

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

BAB V
PENGAWASAN

Pasal 36

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi kemetrolgian melakukan pengawasan terhadap penggunaan UTPP dalam wilayah Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Perangkat Daerah yang membidangi kemetrolgian dapat melibatkan Perangkat Daerah/instansi terkait.
- (3) Tata cara pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 37

- (1) Masyarakat dapat berperan aktif dalam melakukan pengawasan terhadap penggunaan UTPP di wilayah Daerah.

- (2) Peran aktif pengawasan yang dilakukan masyarakat diwujudkan dalam bentuk penyampaian informasi dan/atau pengaduan kepada Perangkat Daerah/instansi terkait.
- (3) Tata cara penyampaian informasi dan/atau pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII

SANKSI ADMINISTRATIF

Bagian Kesatu

Jenis Sanksi Administratif

Pasal 38

- (1) Wajib Retribusi yang tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar.
- (2) Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditagih dengan menggunakan STRD.

Bagian Kedua

Kewenangan Yang Menerapkan Sanksi Administratif

Pasal 39

- (1) Bupati berwenang mengenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan terhadap setiap Wajib Retribusi.

Pasal 40

- (1) Bupati dalam mengenakan Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dapat mendelegasikan kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi kemetrologian.
- (2) Bupati dapat mendelegasikan kewenangan pengenaan sanksi administratif kepada Pejabat lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 41

- (1) Selain Penyidik Kepolisian Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi atau kemetrolgian;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau

- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB IX KETENTUAN PIDANA

Pasal 42

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 7 ayat (2) diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan, atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tindak pidana pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Negara.

Pasal 43

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Negara.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 45

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Blora.

Ditetapkan di Blora

pada tanggal 27 Desember 2018

BUPATI BLORA,

Cap Ttd

DJOKO NUGROHO

Diundangkan di Blora

pada tanggal 27 Desember 2018

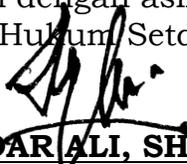
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLORA,

Cap Ttd.

KOMANG GEDE IRAWADI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BLORA TAHUN 2018 NOMOR 24
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA, PROVINSI JAWA
TENGAH : (24/2018)

Sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Blora



A. Kaidar Ali, SH. MH.
NIP. 19610103 198608 1 001

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA
NOMOR 24 TAHUN 2018
TENTANG
PENYELENGGARAAN DAN RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG

I. UMUM

Globalisasi dan perdagangan bebas yang didukung oleh kemajuan teknologi telekomunikasi dan informatika telah memperluas ruang gerak arus transaksi barang melintasi batas-batas wilayah suatu Negara, sehingga barang yang ditawarkan bervariasi baik produksi luar negeri maupun produksi dalam negeri. Kondisi demikian pada satu pihak mempunyai manfaat bagi konsumen karena kebutuhan konsumen akan barang dan/atau jasa yang diinginkan dapat terpenuhi serta semakin terbuka lebar kebebasan untuk memilih aneka jenis dan kualitas barang dan/atau jasa sesuai dengan keinginan dan kemampuan konsumen. Disisi lain, kondisi dan fenomena di atas dapat mengakibatkan kedudukan pelaku usaha dan konsumen menjadi tidak seimbang dan konsumen berada pada posisi yang lemah. Konsumen menjadi objek aktivitas bisnis untuk meraup keuntungan yang sebesar-besarnya oleh pelaku usaha.

Dengan pesatnya kemajuan tersebut, untuk menjamin hak-hak konsumen serta kepastian hukum bagi pelaku usaha, perlu pengaturan jaminan atas kebenaran pengukuran dalam pemakaian standar ukuran, standar satuan dan metoda pengukuran. Oleh karena itu setiap UTTP yang secara langsung ataupun tidak langsung digunakan atau disimpan dalam keadaan siap pakai untuk keperluan menentukan hasil pengukuran, penakaran, atau penimbangan untuk kepentingan umum, usaha, menyerahkan atau menerima barang, menentukan pungutan atau upah, menentukan produk akhir dalam perusahaan, melaksanakan peraturan perundang-undangan wajib ditera/tera ulang. Begitu pula halnya dengan Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT), setiap BDKT yang diedarkan, dijual, ditawarkan atau dipamerkan di dalam negeri wajib memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota berwenang untuk memberikan pelayanan pelaksanaan metrologi legal berupa tera, tera ulang dan pengawasan. Dengan demikian Jasa pelayanan tera/tera ulang kepada orang pribadi atau badan, dapat dipungut retribusi. Hal ini juga sesuai dengan ketentuan Pasal 110 ayat (1) huruf l Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang intinya menyatakan bahwa Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang merupakan jenis retribusi jasa umum yang dapat dipungut oleh Pemerintah Daerah pada saat memberikan pelayanan tera/tera ulang kepada orang pribadi atau badan.

Dalam rangka pelaksanaan pemungutan Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang di wilayah Kabupaten Blora serta sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu mengatur ketentuan tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang dalam Peraturan Daerah. Dengan diundangkannya Peraturan Daerah ini diharapkan dapat memberikan kepastian bagi masyarakat dan dunia usaha yang pada gilirannya diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban pembayaran retribusi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BLORA NOMOR 24

LAMPIRAN
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA
 NOMOR 24 TAHUN 2017
 TENTANG
 PENYELENGGARAAN DAN RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG
 BESARAN TARIF PELAYANAN TERA/TERA ULANG

A. UTTP

| NO. | JENIS | SATUAN | TARIF RETRIBUSI | | | | KETERANGAN |
|-----|--|--------|-----------------|--------------|------------|--------------|------------|
| | | | TERA | | TERA ULANG | | |
| | | | KANTOR | TEMPAT PAKAI | KANTOR | TEMPAT PAKAI | |
| 1. | UKURAN PANJANG (Meter dengan pegangan, meter kayu, meter meja dari logam, tongkat duga, meter saku baja, ban ukur, <i>depth tape</i>) | | | | | | |
| | a. Kapasitas s/d 1 meter | buah | Rp 3.000 | Rp 13.000 | Rp 4.000 | Rp 14.000 | |
| | b. Kapasitas lebih dari 1 s/d 2 meter | buah | Rp 15.000 | Rp 25.000 | Rp 20.000 | Rp 25.000 | |
| | c. Kapasitas lebih dari 2 s/d 10 meter | buah | Rp 20.000 | Rp 30.000 | Rp 25.000 | Rp 30.000 | |
| | d. Kapasitas lebih dari 10 s/d 20 meter | buah | Rp 30.000 | Rp 40.000 | Rp 30.000 | Rp 35.000 | |
| | e. Kapasitas lebih dari 20 s/d 30 meter | buah | Rp 35.000 | Rp 45.000 | Rp 35.000 | Rp 40.000 | |
| | f. Kapasitas lebih dari 30 s/d 40 meter | buah | Rp 40.000 | Rp 50.000 | Rp 40.000 | Rp 45.000 | |
| | g. Kapasitas lebih dari 40 s/d 50 meter | buah | Rp 45.000 | Rp 55.000 | Rp 45.000 | Rp 50.000 | |
| | h. Kapasitas lebih dari 50 meter | buah | Rp 50.000 | Rp 60.000 | Rp 50.000 | Rp 55.000 | |

| NO. | JENIS | SATUAN | TARIF RETRIBUSI | | | | KETERANGAN |
|-----|---|--------|-----------------|--------------|------------|--------------|------------|
| | | | TERA | | TERA ULANG | | |
| | | | KANTOR | TEMPAT PAKAI | KANTOR | TEMPAT PAKAI | |
| | i. Ukuran panjang, jenis: | | | | | | |
| | 1) Alat ukur tinggi orang | buah | Rp 10.000 | Rp 30.000 | Rp 10.000 | Rp 30.000 | |
| | 2) <i>counter meter</i> | buah | Rp 15.000 | Rp 35.000 | Rp 15.000 | Rp 35.000 | |
| 2. | ALAT UKUR PERMUKAAN CAIRAN (<i>LEVEL GAUGE</i>) | | | | | | |
| | a. Mekanik | buah | Rp 150.000 | Rp 400.000 | Rp 150.000 | Rp 400.000 | |
| | b. Elektronik | buah | Rp 200.000 | Rp 500.000 | Rp 200.000 | Rp 500.000 | |
| 3. | TAKARAN (BASA/KERING) | | | | | | |
| | a. Kapasitas s/d 2 liter | buah | Rp 150.000 | Rp 400.000 | Rp 150.000 | Rp 400.000 | |
| | b. Kapasitas lebih dari 2 liter s/d 25 liter | buah | Rp 150.000 | Rp 400.000 | Rp 150.000 | Rp 400.000 | |
| | c. Kapasitas lebih dari 25 liter | buah | Rp 200.000 | Rp 500.000 | Rp 200.000 | Rp 500.000 | |
| 4. | TANGKI UKUR | | | | | | |
| | a. Bentuk Silinder Tegak | | | | | | |
| | 1) Kapasitas s/d 500 Kilo liter | buah | Rp - | Rp 200.000 | Rp - | Rp 225.000 | |
| | 2) Kapasitas lebih dari 500 kilo liter s/d 1000 kilo liter | buah | Rp - | Rp 300.000 | Rp - | Rp 375.000 | |
| | 3) Kapasitas lebih dari 1000 kilo liter s/d 2000 kilo liter | buah | Rp - | Rp 450.000 | Rp - | Rp 575.000 | |

| NO. | JENIS | SATUAN | TARIF RETRIBUSI | | | | KETERANGAN |
|-----|--|--------|-----------------|--------------|------------|--------------|------------|
| | | | TERA | | TERA ULANG | | |
| | | | KANTOR | TEMPAT PAKAI | KANTOR | TEMPAT PAKAI | |
| | 4) Kapasitas lebih dari 2000 kilo liter s/d 5000 kilo liter | buah | Rp - | Rp 600.000 | Rp - | Rp 675.000 | |
| | 5) Kapasitas lebih dari 5000 kilo liter s/d 10000 kilo liter | buah | Rp - | Rp 750.000 | Rp - | Rp 825.000 | |
| | 6) Kapasitas lebih dari 10.000 kilo liter s/d 50.000 kilo liter | buah | Rp - | Rp 1.500.000 | Rp - | Rp 1.500.000 | |
| | 7) Kapasitas lebih dari 50.000 kilo liter s/d 100.000 kilo liter | buah | Rp - | Rp 3.000.000 | Rp - | Rp 3.000.000 | |
| | 8) Kapasitas lebih dari 100.000 kilo liter | buah | Rp - | Rp 5.000.000 | Rp - | Rp 5.000.000 | |
| | b. Bentuk Bola dan Sferoidal | | | | | | |
| | 1) Kapasitas s/d 500 Kilo liter | buah | Rp - | Rp 500.000 | Rp - | Rp 500.000 | |
| | 2) Kapasitas lebih dari 500 kilo liter s/d 1000 kilo liter | buah | Rp - | Rp 750.000 | Rp - | Rp 750.000 | |
| | 3) Kapasitas lebih dari 1000 kilo liter s/d 2000 kilo liter | buah | Rp - | Rp 2.000.000 | Rp - | Rp 2.000.000 | |
| | 4) Kapasitas lebih dari 2000 kilo liter s/d 5000 kilo liter | buah | Rp - | Rp 3.500.000 | Rp - | Rp 3.500.000 | |
| | 5) Kapasitas lebih dari 5000 kilo liter | buah | Rp - | Rp 6.500.000 | Rp - | Rp 6.500.000 | |

| NO. | JENIS | SATUAN | TARIF RETRIBUSI | | | | KETERANGAN |
|-----|---|--------|-----------------|--------------|------------|--------------|--|
| | | | TERA | | TERA ULANG | | |
| | | | KANTOR | TEMPAT PAKAI | KANTOR | TEMPAT PAKAI | |
| | c. Bentuk Silinder Datar | | | | | | |
| | 1) Kapasitas s/d 10 Kilo liter | buah | Rp - | Rp 325.000 | Rp - | Rp 325.000 | Tangki ukur silinder datar yang mempunyai dua komponen atau lebih, setiap kompartemen dihitung sebagai 1 alat ukur |
| | 2) Kapasitas lebih dari 10 kilo liter s/d 15 kilo liter | buah | Rp - | Rp 400.000 | Rp - | Rp 400.000 | |
| | 3) Kapasitas lebih dari 15 kilo liter s/d 20 kilo liter | buah | Rp - | Rp 500.000 | Rp - | Rp 500.000 | |
| | 4) Kapasitas lebih dari 20 kilo liter s/d 25 kilo liter | buah | Rp - | Rp 600.000 | Rp - | Rp 600.000 | |
| | 5) Kapasitas lebih dari 25 kilo liter s/d 30 kilo liter | buah | Rp - | Rp 700.000 | Rp - | Rp 700.000 | |
| | 6) Kapasitas lebih dari 30 kilo liter s/d 40 kilo liter | buah | Rp - | Rp 800.000 | Rp - | Rp 800.000 | |
| | 7) Kapasitas lebih dari 40 kilo liter | buah | Rp - | Rp 1.100.000 | Rp - | Rp 1.100.000 | |
| 5. | TANGKI UKUR GERAK | | | | | | Tangki ukur gerak yang mempunyai dua komponen atau lebih, setiap kompartemen dihitung sebagai 1 alat ukur |
| | a. Tangki ukur mobil | | | | | | |
| | 1) Kapasitas s/d 5 Kilo liter | buah | Rp 110.000 | Rp 120.000 | Rp 110.000 | Rp 120.000 | |
| | 2) Kapasitas lebih dari 5 kilo liter s/d 10 kilo liter | buah | Rp 170.000 | Rp 180.000 | Rp 170.000 | Rp 180.000 | |
| | 3) Kapasitas lebih dari 10 kilo liter s/d 15 kilo liter | buah | Rp 250.000 | Rp 260.000 | Rp 250.000 | Rp 260.000 | |

| NO. | JENIS | SATUAN | TARIF RETRIBUSI | | | | KETERANGAN |
|-----|--|--------|-----------------|--------------|------------|--------------|------------|
| | | | TERA | | TERA ULANG | | |
| | | | KANTOR | TEMPAT PAKAI | KANTOR | TEMPAT PAKAI | |
| | 4) Kapasitas lebih dari 15 kilo liter | buah | Rp 300.000 | Rp 310.000 | Rp 300.000 | Rp 310.000 | |
| | b. Tangki ukur wagon | | | | | | |
| | 1) Kapasitas s/d 5 Kilo liter | buah | Rp - | Rp 120.000 | Rp - | Rp 120.000 | |
| | 2) Kapasitas lebih dari 5 kilo liter s/d 10 kilo liter | buah | Rp - | Rp 180.000 | Rp - | Rp 180.000 | |
| | 3) Kapasitas lebih dari 10 kilo liter s/d 15 kilo liter | buah | Rp - | Rp 260.000 | Rp - | Rp 260.000 | |
| | 4) Kapasitas lebih dari 15 kilo liter | buah | Rp - | Rp 310.000 | Rp - | Rp 310.000 | |
| | c. Tangki Ukur Tongkang, Tangki ukur pindah, tangki ukur apung dan kapal | | | | | | |
| | 1) Kapasitas s/d 50 Kilo liter | buah | Rp - | Rp 220.000 | Rp - | Rp 250.000 | |
| | 2) Kapasitas lebih dari 50 kilo liter s/d 75 kilo liter | buah | Rp - | Rp 270.000 | Rp - | Rp 300.000 | |
| | 3) Kapasitas lebih dari 75 kilo liter s/d 100 kilo liter | buah | Rp - | Rp 310.000 | Rp - | Rp 350.000 | |
| | 4) Kapasitas lebih dari 100 kilo liter s/d 250 kilo liter | buah | Rp - | Rp 500.000 | Rp - | Rp 550.000 | |
| | 5) Kapasitas lebih dari 250 kilo liter s/d 500 kilo liter | buah | Rp - | Rp 675.000 | Rp - | Rp 700.000 | |

| NO. | JENIS | SATUAN | TARIF RETRIBUSI | | | | KETERANGAN |
|-----|--|--------|-----------------|--------------|------------|--------------|------------|
| | | | TERA | | TERA ULANG | | |
| | | | KANTOR | TEMPAT PAKAI | KANTOR | TEMPAT PAKAI | |
| | 6) Kapasitas lebih dari 500 kilo liter s/d 1.000 kilo liter | buah | Rp - | Rp 950.000 | Rp - | Rp 975.000 | |
| | 7) Kapasitas lebih dari 1000 kilo liter s/d 5.000 kilo liter | buah | Rp - | Rp 2.250.000 | Rp - | Rp 2.400.000 | |
| 6. | ALAT UKUR DARI GELAS | | | | | | |
| | a. Labu ukur, pipet, mikropipet skala tunggal | buah | Rp 35.000 | Rp - | Rp 35.000 | Rp - | |
| | b. Gelas ukur, Buret, Pipet, Mikropipet skala majemuk | buah | Rp 40.000 | Rp - | Rp 40.000 | Rp - | |
| 7. | BEJANA UKUR | | | | | | |
| | a. Kapasitas s/d 50 liter | buah | Rp 100.000 | Rp 150.000 | Rp 100.000 | Rp 150.000 | |
| | b. Kapasitas lebih dari 50 liter s/d 200 liter | buah | Rp 125.000 | Rp 250.000 | Rp 125.000 | Rp 250.000 | |
| | c. Kapasitas lebih dari 200 liter s/d 500 liter | buah | Rp 150.000 | Rp 300.000 | Rp 150.000 | Rp 300.000 | |
| | d. Kapasitas lebih dari 500 liter s/d 1.000 liter | buah | Rp 200.000 | Rp 400.000 | Rp 200.000 | Rp 400.000 | |
| | e. Kapasitas lebih dari 1.000 liter s/d 2.000 liter | buah | Rp 300.000 | Rp 500.000 | Rp 300.000 | Rp 500.000 | |
| | f. Kapasitas lebih dari 2.000 liter s/d 5.000 liter | buah | Rp 450.000 | Rp 750.000 | Rp 450.000 | Rp 750.000 | |

| NO. | JENIS | SATUAN | TARIF RETRIBUSI | | | | KETERANGAN |
|-----|---|--------|-----------------|--------------|--------------|--------------|------------|
| | | | TERA | | TERA ULANG | | |
| | | | KANTOR | TEMPAT PAKAI | KANTOR | TEMPAT PAKAI | |
| 8. | METER TAKSI | buah | Rp 60.000 | Rp 70.000 | Rp 60.000 | Rp 70.000 | |
| 9. | ALAT UKUR CAIRAN MINYAK (METER BAHAN BAKAR MINYAK) | | | | | | |
| | a. Meter Induk | | | | | | |
| | 1) Kapasitas s/d 25 m ³ /h | buah | Rp - | Rp 175.000 | Rp - | Rp 175.000 | |
| | 2) Kapasitas lebih dari 25 m ³ /h sampai dengan 100 m ³ /h | buah | Rp - | Rp 575.000 | Rp - | Rp 575.000 | |
| | 3) Kapasitas lebih dari 100 m ³ /h sampai dengan 500 m ³ /h | buah | Rp - | Rp 1.950.000 | Rp - | Rp 1.950.000 | |
| | 4) Kapasitas lebih dari 500 m ³ /h | buah | Rp - | Rp 2.600.000 | Rp - | Rp 2.600.000 | |
| | b. Meter Kerja | | | | | | |
| | 1) Kapasitas s/d 25 m ³ /h | buah | Rp 100.000 | Rp 125.000 | Rp 100.000 | Rp 125.000 | |
| | 2) Kapasitas lebih dari 25 m ³ /h sampai dengan 100 m ³ /h | buah | Rp 350.000 | Rp 400.000 | Rp 350.000 | Rp 400.000 | |
| | 3) Kapasitas lebih dari 100 m ³ /h sampai dengan 500 m ³ /h | buah | Rp 1.250.000 | Rp 1.350.000 | Rp 1.250.000 | Rp 1.350.000 | |
| | 4) Kapasitas lebih dari 500 m ³ /h | buah | Rp 1.750.000 | Rp 1.850.000 | Rp 1.750.000 | Rp 1.850.000 | |
| | c. Pompa Ukur Bahan BaKar Minyak untuk setiap pesawat | buah | Rp - | Rp 150.000 | Rp - | Rp 150.000 | |

| NO. | JENIS | SATUAN | TARIF RETRIBUSI | | | | KETERANGAN |
|-----|---|--------|-----------------|--------------|------------|--------------|------------|
| | | | TERA | | TERA ULANG | | |
| | | | KANTOR | TEMPAT PAKAI | KANTOR | TEMPAT PAKAI | |
| 10. | ALAT UKUR GAS | | | | | | |
| | a. Meter Induk | | | | | | |
| | 1) Kapasitas s/d 100 m ³ /h | buah | Rp - | Rp 250.000 | Rp - | Rp 250.000 | |
| | 2) Kapasitas lebih dari 100 m ³ /h sampai dengan 500 m ³ /h | buah | Rp - | Rp 450.000 | Rp - | Rp 450.000 | |
| | 3) Kapasitas lebih dari 500 m ³ /h sampai dengan 1.000 m ³ /h | buah | Rp - | Rp 600.000 | Rp - | Rp 600.000 | |
| | 4) Kapasitas lebih dari 1000 m ³ /h sampai dengan 2000 m ³ /h | buah | Rp - | Rp 750.000 | Rp - | Rp 750.000 | |
| | 5) Kapasitas lebih dari 2000 m ³ /h | buah | Rp - | Rp 1.000.000 | Rp - | Rp 1.000.000 | |
| | b. Meter Kerja | | | | | | |
| | 1) Kapasitas s/d 100 m ³ /h | buah | Rp - | Rp 150.000 | Rp - | Rp 150.000 | |
| | 2) Kapasitas lebih dari 100 m ³ /h sampai dengan 500 m ³ /h | buah | Rp - | Rp 250.000 | Rp - | Rp 250.000 | |
| | 3) Kapasitas lebih dari 500 m ³ /h sampai dengan 1.000 m ³ /h | buah | Rp - | Rp 350.000 | Rp - | Rp 350.000 | |
| | 4) Kapasitas lebih dari 1000 m ³ /h sampai dengan 2000 m ³ /h | buah | Rp - | Rp 450.000 | Rp - | Rp 450.000 | |
| | 5) Kapasitas lebih dari 2000 m ³ /h | buah | Rp - | Rp 750.000 | Rp - | Rp 750.000 | |

| NO. | JENIS | SATUAN | TARIF RETRIBUSI | | | | KETERANGAN |
|-----|---|--------|-----------------|--------------|------------|--------------|------------|
| | | | TERA | | TERA ULANG | | |
| | | | KANTOR | TEMPAT PAKAI | KANTOR | TEMPAT PAKAI | |
| | c. Meter gas office dan sejenisnya (merupakan suatu sistem/unit alat ukur) | buah | Rp - | Rp 300.000 | Rp - | Rp 300.000 | |
| | d. Perlengkapan meter gas office (jika diuji tersendiri) setiap alat perlengkapan | buah | Rp - | Rp 75.000 | Rp - | Rp 75.000 | |
| | e. Pompa ukur Bahan Bakar Gas dan Elpiji untuk setiap badan ukur | buah | Rp - | Rp 110.000 | Rp - | Rp 110.000 | |
| 11. | METER AIR | | | | | | |
| | a. Meter Induk | | | | | | |
| | 1) Kapasitas s/d 15 m ³ /h | buah | Rp 100.000 | Rp 120.000 | Rp 150.000 | Rp 175.000 | |
| | 2) Kapasitas lebih dari 15 m ³ /h sampai dengan 100 m ³ /h | buah | Rp 150.000 | Rp 170.000 | Rp 250.000 | Rp 275.000 | |
| | 3) Kapasitas lebih dari 100 m ³ /h | buah | Rp 200.000 | Rp 220.000 | Rp 300.000 | Rp 325.000 | |
| | b. Meter Kerja | | | | | | |
| | 1) Kapasitas s/d 10 m ³ /h | buah | Rp 2.500 | Rp 4.000 | Rp 5.000 | Rp 7.500 | |
| | 2) Kapasitas lebih dari 10 m ³ /h sampai dengan 100 m ³ /h | buah | Rp 10.000 | Rp 12.000 | Rp 15.000 | Rp 17.500 | |
| | 3) Kapasitas lebih dari 100 m ³ /h | buah | Rp 25.000 | Rp 27.500 | Rp 50.000 | Rp 55.000 | |

| NO. | JENIS | SATUAN | TARIF RETRIBUSI | | | | KETERANGAN |
|-----|--|--------|-----------------|--------------|------------|--------------|--|
| | | | TERA | | TERA ULANG | | |
| | | | KANTOR | TEMPAT PAKAI | KANTOR | TEMPAT PAKAI | |
| 12. | METER CAIRAN SELAIN AIR | | | | | | |
| | a. Meter Induk | | | | | | |
| | 1) Kapasitas s/d 15 m ³ /h | buah | Rp - | Rp 125.000 | Rp - | Rp 175.000 | |
| | 2) Kapasitas lebih dari 15 m ³ /h sampai dengan 100 m ³ /h | buah | Rp - | Rp 175.000 | Rp - | Rp 275.000 | |
| | 3) Kapasitas lebih dari 100 m ³ /h | buah | Rp - | Rp 225.000 | Rp - | Rp 325.000 | |
| | b. Meter Kerja | | | | | | |
| | 1) Kapasitas s/d 10 m ³ /h | buah | Rp - | Rp 27.500 | Rp - | Rp 27.500 | |
| | 2) Kapasitas lebih dari 10 m ³ /h sampai dengan 100 m ³ /h | buah | Rp - | Rp 37.500 | Rp - | Rp 37.500 | |
| | 3) Kapasitas lebih dari 100 m ³ /h | buah | Rp - | Rp 75.000 | Rp - | Rp 75.000 | |
| 13. | ALAT KOMPENSASI SUHU (ATC) TEKANAN/KOMPENSASI LAINNYA | buah | Rp - | Rp 100.000 | Rp - | Rp 100.000 | |
| 14. | METER PROVER | | | | | | |
| | a. Kapasitas s/d 2.000 liter | buah | Rp - | Rp 300.000 | Rp - | Rp 300.000 | Meter Prover mempunyai 2 (dua) seksi atau lebih. Setiap seksi dihitung sebagai 1 alat ukur |
| | b. Kapasitas lebih dari 2.000 liter s/d 10.000 liter | buah | Rp - | Rp 500.000 | Rp - | Rp 500.000 | |
| | c. Kapasitas lebih dari 10.000 liter | buah | Rp - | Rp 750.000 | Rp - | Rp 750.000 | |

| NO. | JENIS | SATUAN | TARIF RETRIBUSI | | | | KETERANGAN |
|-----|--|--------|-----------------|--------------|------------|--------------|------------|
| | | | TERA | | TERA ULANG | | |
| | | | KANTOR | TEMPAT PAKAI | KANTOR | TEMPAT PAKAI | |
| 15. | METER ARUS PROVER | | | | | | |
| | a. Kapasitas s/d 10 kg/min | buah | Rp - | Rp 150.000 | Rp - | Rp 150.000 | |
| | b. Kapasitas lebih dari 10 kg/min s/d 100 kg/min | buah | Rp - | Rp 350.000 | Rp - | Rp 350.000 | |
| | c. Kapasitas lebih dari 100 kg/min s/d 500 kg/min | buah | Rp - | Rp 950.000 | Rp - | Rp 950.000 | |
| | d. Kapasitas lebih dari 500 kg/min s/d 1.000 kg/min | buah | Rp - | Rp 1.500.000 | Rp - | Rp 1.500.000 | |
| | e. Kapasitas lebih dari 1000 kg/min | buah | Rp - | Rp 2.250.000 | Rp - | Rp 2.250.000 | |
| 16. | ALAT UKUR PENGISI (<i>FILLING MACHINE</i>) UNTUK SETIAP JENIS MEDIA | buah | Rp - | Rp 90.000 | Rp - | Rp 90.000 | |
| 17. | METER LISTRIK (METER kWh) | | | | | | |
| | a. Kelas 0,2 atau kurang | | | | | | |
| | 1) 3 (tiga) phasa | buah | Rp 60.000 | Rp 70.000 | Rp 60.000 | Rp 70.000 | |
| | 2) 1 (satu) phasa | buah | Rp 20.000 | Rp 30.000 | Rp 20.000 | Rp 30.000 | |
| | b. Kelas 0,5 atau kelas 1 | | | | | | |
| | 1) 3 (tiga) phasa | buah | Rp 7.500 | Rp 8.500 | Rp 7.500 | Rp 8.500 | |
| | 2) 1 (satu) phasa | buah | Rp 2.500 | Rp 3.500 | Rp 2.500 | Rp 3.500 | |

| NO. | JENIS | SATUAN | TARIF RETRIBUSI | | | | KETERANGAN |
|-----|--|--------|-----------------|--------------|------------|--------------|------------|
| | | | TERA | | TERA ULANG | | |
| | | | KANTOR | TEMPAT PAKAI | KANTOR | TEMPAT PAKAI | |
| | c. Kelas 2 | | | | | | |
| | 1) 3 (tiga) phasa | buah | Rp 4.500 | Rp 5.500 | Rp 4.500 | Rp 5.500 | |
| | 2) 1 (satu) phasa | buah | Rp 1.500 | Rp 2.500 | Rp 1.500 | Rp 2.500 | |
| 18. | PEMBATAS ARUS LISTRIK | buah | Rp 2.000 | Rp 3.000 | Rp 2.000 | Rp 3.000 | |
| 19. | ANAK TIMBANGAN | | | | | | |
| | a. Ketelitian sedang dan biasa (kelas m2 dan m3) | | | | | | |
| | 1) sampai dengan 1 kg | buah | Rp 300 | Rp 300 | Rp 500 | Rp 1.500 | |
| | 2) lebih dari 1 kg s/d 5 kg. | buah | Rp 500 | Rp 500 | Rp 1.000 | Rp 2.000 | |
| | 3) lebih dari 5 kg s/d 50 kg. | buah | Rp 1.500 | Rp 1.500 | Rp 2.000 | Rp 3.000 | |
| | b. Ketelitian halus (F2 dan M1) | | | | | | |
| | 1) sampai dengan 1 kg | buah | Rp 1.000 | Rp 1.000 | Rp 2.000 | Rp 3.000 | |
| | 2) lebih dari 1 kg s/d 5 kg. | buah | Rp 1.500 | Rp 1.500 | Rp 2.500 | Rp 3.500 | |
| | 3) lebih dari 5 kg s/d 50 kg. | buah | Rp 7.500 | Rp 7.500 | Rp 10.000 | Rp 11.000 | |
| | c. Ketelitian khusus (E2 dan F1) | | | | | | |
| | 1) sampai dengan 1 kg | buah | Rp 25.000 | Rp 35.000 | Rp 60.000 | Rp 70.000 | |
| | 2) lebih dari 1 kg s/d 5 kg. | buah | Rp 30.000 | Rp 45.000 | Rp 60.000 | Rp 70.000 | |
| | 3) lebih dari 5 kg s/d 50 kg. | buah | Rp 35.000 | Rp 55.000 | Rp 60.000 | Rp 70.000 | |

| NO. | JENIS | SATUAN | TARIF RETRIBUSI | | | | KETERANGAN |
|-----|--|--------|-----------------|--------------|------------|--------------|------------|
| | | | TERA | | TERA ULANG | | |
| | | | KANTOR | TEMPAT PAKAI | KANTOR | TEMPAT PAKAI | |
| 20. | TIMBANGAN | | | | | | |
| | a. Neraca | buah | Rp 11.000 | Rp 31.000 | Rp 20.000 | Rp 40.000 | |
| | b. Dacin | | | | | | |
| | 1) kapasitas sampai dengan 5 kg | buah | Rp 1.500 | Rp 21.500 | Rp 12.500 | Rp 25.000 | |
| | 2) kapasitas lebih dari 25 kg | buah | Rp 2.500 | Rp 22.500 | Rp 15.000 | Rp 35.000 | |
| | c. Sentisimal | | | | | | |
| | 1) kapasitas sampai dengan 150 kg | buah | Rp 7.500 | Rp 27.500 | Rp 20.000 | Rp 40.000 | |
| | 2) kapasitas lebih dari 150 kg s/d 500kg | buah | Rp 8.000 | Rp 28.000 | Rp 22.500 | Rp 42.500 | |
| | 3) kapasitas lebih dari 500 kg | buah | Rp 15.000 | Rp 40.000 | Rp 40.000 | Rp 75.000 | |
| | d. Desimal/Milisimal | buah | Rp 8.000 | Rp 28.000 | Rp 22.500 | Rp 42.500 | |
| | e. Bobot Ingsut | | | | | | |
| | 1) kapasitas sampai dengan 25 kg | buah | Rp 6.500 | Rp 26.500 | Rp 17.500 | Rp 37.500 | |
| | 2) kapasitas lebih dari 25 kg s/d 150 kg | buah | Rp 7.500 | Rp 27.500 | Rp 20.000 | Rp 40.000 | |
| | 3) kapasitas lebih dari 150 kg | buah | Rp 11.500 | Rp 31.500 | Rp 25.000 | Rp 60.000 | |
| | f. Meja Beranger | buah | Rp 1.500 | Rp 21.500 | Rp 12.500 | Rp 25.000 | |
| | g. Pegas | | | | | | |
| | 1) kapasitas sampai dengan 25 kg | buah | Rp 6.500 | Rp 26.500 | Rp 12.500 | Rp 32.500 | |

| NO. | JENIS | SATUAN | TARIF RETRIBUSI | | | | KETERANGAN |
|-----|--|--------|-----------------|--------------|------------|--------------|------------|
| | | | TERA | | TERA ULANG | | |
| | | | KANTOR | TEMPAT PAKAI | KANTOR | TEMPAT PAKAI | |
| | 2) kapasitas lebih dari 25 kg | buah | Rp 10.000 | Rp 30.000 | Rp 22.500 | Rp 37.500 | |
| | h. Cepat | | | | | | |
| | 1) kapasitas sampai dengan 500 kg | buah | Rp 20.000 | Rp 40.000 | Rp 40.000 | Rp 60.000 | |
| | 2) kapasitas lebih dari 500 kg | buah | Rp 25.000 | Rp 45.000 | Rp 50.000 | Rp 70.000 | |
| | i. Kwadran/Surat | buah | Rp 1.500 | Rp 7.500 | Rp 10.000 | Rp 15.000 | |
| | j. Elektronik (Kelas III dan IIII) | | | | | | |
| | 1) Kapasitas s/d 25 kg | buah | Rp 27.500 | Rp 47.500 | Rp 27.500 | Rp 47.500 | |
| | 2) Kapasitas lebih dari 25 kg sampai dengan 150 kg | buah | Rp 30.000 | Rp 50.000 | Rp 30.000 | Rp 50.000 | |
| | 3) Kapasitas lebih dari 150 kg sampai dengan 500 kg | buah | Rp 35.000 | Rp 55.000 | Rp 35.000 | Rp 55.000 | |
| | 4) Kapasitas lebih dari 500 kg sampai dengan 1000 kg | buah | Rp 50.000 | Rp 70.000 | Rp 50.000 | Rp 70.000 | |
| | 5) Kapasitas lebih dari 1000 kg | buah | Rp 130.000 | Rp 150.000 | Rp 130.000 | Rp 150.000 | |
| | k. Elektronik (Kelas II) | | | | | | |
| | 1) Kapasitas s/d 1 kg | buah | Rp 50.000 | Rp 60.000 | Rp 50.000 | Rp 60.000 | |
| | 2) Kapasitas lebih dari 1 kg | buah | Rp 60.000 | Rp 70.000 | Rp 60.000 | Rp 70.000 | |
| | l. Elektronik (Kelas I) | | | | | | |
| | 1) Kapasitas s/d 1 kg | buah | Rp 125.000 | Rp 135.000 | Rp 125.000 | Rp 135.000 | |

| NO. | JENIS | SATUAN | TARIF RETRIBUSI | | | | KETERANGAN |
|-----|--|--------|-----------------|--------------|------------|--------------|------------|
| | | | TERA | | TERA ULANG | | |
| | | | KANTOR | TEMPAT PAKAI | KANTOR | TEMPAT PAKAI | |
| | 2) Kapasitas lebih dari 1 kg | buah | Rp 150.000 | Rp 160.000 | Rp 150.000 | Rp 160.000 | |
| | m. Timbangan Jembatan | | | | | | |
| | 1) Kapasitas s/d 50 ton | buah | Rp - | Rp 1.000.000 | Rp - | Rp 1.000.000 | |
| | 2) Kapasitas lebih dari 50 ton | buah | Rp - | Rp 1.500.000 | Rp - | Rp 1.500.000 | |
| | n. Timbangan Ban Berjalan | | | | | | |
| | 1) Kapasitas s/d 100 ton/h | buah | Rp - | Rp 400.000 | Rp - | Rp 400.000 | |
| | 2) Kapasitas lebih dari 100 ton/h sampai dengan 500 ton/h | buah | Rp - | Rp 550.000 | Rp - | Rp 550.000 | |
| | 3) Kapasitas lebih dari 500 ton/h | buah | Rp - | Rp 650.000 | Rp - | Rp 650.000 | |
| 22. | METER KADAR AIR | | | | | | |
| | a. Untuk biji-bijian tidak mengandung minyak (setiap komoditi) | buah | Rp 25.000 | Rp 35.000 | Rp 35.000 | Rp 45.000 | |
| | b. Untuk kayu-kayuan dan komoditi lain (setiap komoditi) | buah | Rp 50.000 | Rp 60.000 | Rp 70.000 | Rp 80.000 | |
| | c. Untuk biji-bijian yang mengandung minyak (setiap komoditi) | buah | Rp 40.000 | Rp 50.000 | Rp 60.000 | Rp 70.000 | |

B. BIAYA PENGUJIAN

| NO. | JENIS | SATUAN | TARIF RETRIBUSI | | KET. |
|-----|--|--------|-----------------|--------------|------|
| | | | KANTOR | TEMPAT PAKAI | |
| 1. | Selain UTTP tersebut huruf A atau barang-barang bukan UTTP, dihitung berdasarkan lamanya pengujian dengan minimum 2 jam. Setiap bagian dari jam dihitung 1 jam | jam | Rp. 10.000 | Rp. 20.000 | |
| 2. | BDKT Pengujian dilakukan per jenis BDKT per isi nominal untuk tiap jam. Setiap bagian dari jam dihitung 1 jam | jam | Rp. 25.000 | Rp. 25.000 | |

C. BIAYA PENELITIAN

| NO. | JENIS | SATUAN | TARIF RETRIBUSI | | KET. |
|-----|--|--------|-----------------|--------------|------|
| | | | KANTOR | TEMPAT PAKAI | |
| 1. | Biaya penelitian dalam rangka izin tanda pabrik atau pengukuran atau penimbangan lainnya yang jenisnya tercantum dalam huruf A | jam | Rp. 20.000 | Rp. 20.000 | |

D. TABEL

| NO. | JENIS | SATUAN | TARIF RETRIBUSI | | KET. |
|-----|-------|--------|-----------------|--------------|------|
| | | | KANTOR | TEMPAT PAKAI | |
| 1. | Tabel | buku | Rp. 350.000 | Rp. 350.000 | |

BUPATI BLORA,
Cap Ttd.
DJOKO NUGROHO